



Media: Republika

Hari: Jumat

Tanggal: 09 Maret 2012

Halaman: 16

Anggaran BBM Pemkot Dievaluasi

Bakal ada penyesuaian biaya operasional mobil dinas dan pemakaian listrik.

YOGYAKARTA — Pemerintah Kota Yogyakarta akan melakukan evaluasi anggaran terutama untuk operasional kendaraan dinas dan penggunaan listrik di gedung pemerintahan jika kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan tarif dasar listrik (TDL) jadi diberlakukan. Kenaikan harga BBM secara otomatis akan mengurangi belanja BBM untuk operasional mobil dinas di lingkungan Pemkot Yogyakarta.

"Kalau jadi naik, anggaran yang semula mungkin bisa untuk beli 100 liter tentunya menjadi berkurang. Kalau memang jadi naik, kita akan evaluasi penganggarnya di APBD Perubahan," kata Kepala Bidang Anggaran Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan (DPDPK) Kadri Renggono, saat ditemui di kantornya, Kamis (8/3).

Perhitungan ulang anggaran yang telah ditetapkan, menurutnya, dibutuhkan agar pelayanan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tidak terganggu. Hal tersebut sesuai dengan misi utama keberadaan Pemkot Yogyakarta sebagai pelayan bagi masyarakat.

Sedangkan untuk kenaikan biaya listrik, meski belum ada kepastian, hal tersebut tetap harus disikapi oleh Pemkot Yogyakarta. Salah satu

tunya dengan melakukan penghematan penggunaan listrik di setiap SK PD. Termasuk evaluasi dari permohonan kenaikan daya listrik yang diajukan oleh setiap instansi.

Kepala Dinas Bangunan Gedung dan Aset Daerah (DBGAD) Kota Yogyakarta Hari Setya Wacana menyatakan, penggunaan BBM untuk kendaraan dinas di masing-masing instansi sudah dijatah tergantung operasionalnya.

"Semua sudah dijatah, termasuk sepeda motor maupun kendaraan roda empat setiap harinya ada aturan maksimalnya. Kecuali mobil operasional diatur berdasarkan jarak tempuh," terangnya.

Jatah bagi kendaraan jabatan di DBGAD setiap bulannya hanya untuk 16 hari kerja dengan pembatasan setiap hari maksimal lima liter. "Ada penambahan tidaknya nanti tergantung kebijakan wali kota," jelas dia.

Sedangkan untuk kenaikan TDL, pihaknya akan mengeluarkan surat edaran penghematan listrik ke seluruh instansi. Salah satu isi surat edaran itu adalah penggunaan alat pendingin ruangan yang diperbolehkan setelah pukul 09.00 dengan temperatur tidak terlalu dingin.

Biaya penggunaan listrik di seluruh gedung Pemkot Yogyakarta pada Februari lalu mencapai Rp 194 juta per bulan. Biaya itu dipastikan naik jika TDL mengalami kenaikan.

Terpisah Ketua Komisi A DPRD Kota Yogyakarta Chang Wendriyanto juga menegaskan, evaluasi anggaran belanja rutin seperti BBM dan listrik memang harus dilakukan. Hal tersebut tidak hanya karena menyikapi kenaikan harga jualnya, namun juga untuk menentukan efektivitas kinerja PNS untuk melayani masyarakat.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pajak Daerah dan Pengelo	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Dinas Bangunan Gedung dan Aset			

Yogyakarta, 08 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005